

ABSTRAK

Penelitian ini tentang “Problematika Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sebab terjadinya diversi di Polres Batang, pelaksanaan diversi dan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang

Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Permasalahan dianalisis berdasarkan teori hukum progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi terjadi dalam penyidikan di Polres Batang disebabkan adanya kesepakatan antara anak pelaku dan keluarganya dengan korban untuk menyelesaikan perkaranya di luar proses peradilan pidana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 11 Th. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), kewenangan diskresi Kepolisian dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan diversi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang dilaksanakan berdasarkan UUSPPA khususnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dan Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006. Bentuk diversi menurut Pasal 11 UUSPPA yaitu perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/106/X/2016/ Reskrim di Polres Batang antara lain problematika yuridis berupa perbedaan penafsiran ketentuan syarat diversi berkaitan dengan ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UUSPPA, ganti rugi tidak dapat segera dipenuhi. Problematika tersebut diatasi melalui upaya, penyamaan persepsi antar penegak hukum melalui koordinasi, melakukan pendekatan mediasi dan penyidik memberikan masukan agar korban menuntut ganti rugi secara wajar / patut

Disarankan perlu ada ketegasan mengenai syarat diversi terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, misalnya dengan menambahkan klausul “diversi dapat/tidak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun” pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, agar tidak terjadi perlakuan yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Penyidik agar dapat melakukan upaya diversi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengingat diversi hanya dapat dilakukan atas persetujuan korban. Sepanjang korban menyetujuinya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak hendaknya diselesaikan di luar proses peradilan pidana.

Kata kunci : Problematika, penyidikan, diversi

ABSTRACT

This research is about "Problems of Diversity Implementation Based on Investigation Order Number: Sp. Sidik / 106 / X / 2016 / Reskrim in Batang Police Station aims to know and analyze the causes of diversion in Batang Polres, the implementation of diversion and problematic faced in the implementation of the investigation level diversion based on the Investigation Order Number Sp. Sidik / 106 / X / 2016 / Reskrim at Batang Police Station

The approach used is field research (field research). Data collection through interviews, literature study and documentation. Problems are analyzed based on progressive legal theory.

The results of the study indicate that the diversion occurred in the investigation at Batang Polres because of the agreement between the child of the perpetrator and his / her family with the victim to settle his case outside the criminal justice process by referring to the legislation, especially Law no. 11 Th. 2012 on the Criminal Justice System of the Child (UUSPPA), the discretionary authority of the Police and for the best interests of the child. Implementation is based on the Investigation Order Number Sp. Sidik / 106 / X / 2016 / Reskrim at Batang Resort Police shall be conducted on the basis of UUSPPA especially Articles 6 through Article 15 and Secret Telegram of Kabareskrim Polri. Pol .: TR / 1124 / XI / 2006. The form of diversion under Article 11 of UUSPPA is peace with or without compensation; handover back to parent / Guardian; participation in education or training in educational institution or LPKS no later than 3 (three) months; or community service. The problems faced in the implementation of the diversion of the level of investigation based on the Investigation Order Number Sp. Sidik / 106 / X / 2016 / Reskrim at Polres Batang, among others juridical problematical in the form of different interpretation of the provisions of the diversion conditions relating to criminal penalties as set forth in Article 7 paragraph (2) letter a UUSPPA, compensation can not be immediately fulfilled. The problematic is solved through efforts, equality of perceptions among law enforcers through coordination, mediation approach and investigators provide input to the victims to demand compensation fairly

It is recommended that there be firmness regarding the terms of the diversion of criminal offenses with imprisonment over 7 (seven) years, for example by adding a "diversion" clause / can not be done in the event that a criminal offense is punishable by imprisonment over 7 (seven) years "In Article 7 Paragraph (2) of UUSPPA, in order to avoid different treatment of children committing criminal offenses punishable by imprisonment of more than 7 (seven) years. Investigators should be able to make efforts to divert all criminal acts committed by children since diversion can only be done with the consent of the victim. As long as the victim approves the criminal case committed by the child should be settled outside the criminal justice process.

Keywords: Problematic, investigation, diversion